

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ketenagakerjaan disadari bersifat kompleks karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang seringkali tidak mudah untuk dipahami. Karena sifatnya yang kompleks, maka penanganan persoalan ketenagakerjaan memerlukan pendekatan yang menyeluruh atau lintas sektor serta diletakkan dalam arus utama (*mainstream*) perencanaan pembangunan¹.

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja, yang selanjutnya semakin diciutkan oleh faktor - faktor eksternal yang pada

¹ . Marpaleni, *Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2012, hlm. 2

gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya penyediaan lapangan kerja².

Pendekatan sektoral yang sempit dan keterbatasan data - data ketenagakerjaan jelas tidak memadai untuk membuat suatu kebijakan dan mungkin secara keseluruhan malah bersifat merugikan (*counter productive*). Sebagai contoh adanya kebijakan proteksi yang berlebihan terhadap pekerja sektor formal melalui mekanisme upah minimum sebagaimana ditempuh oleh negara-negara Amerika Latin, justru berdampak terhadap tingginya disparitas tingkat upah antara pekerja formal dan informal yang pada gilirannya akan memperbesar ketimpangan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah angkatan kerja di Palembang yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimulai pada tahun 2004, yaitu sebesar 53,43 persen sampai pada tahun 2014 sebesar 60,76 persen.

Tabel 1.1

Persentase Ketenagakerjaan di Kota Palembang Tahun 2004-2014

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Menganggur
2004	53,43	48,63	4,80
2005	55,67	49,86	5,81

² . Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia", Volume 8, Jurnal, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak, 2012)

2006	57,11	50,97	6,14
2007	58,99	50,89	8,10
2008	60,95	51,54	9,41
2009	62,48	51,68	10,80
2010	63,79	54,88	8,91
2011	64,84	58,31	6,51
2012	60,28	54,21	6,07
2013	59,29	53,87	5,42
2014	60,76	57,70	3,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Tahun 2003 - 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa secara umum jumlah penduduk yang bekerja di Palembang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini diikuti dengan kenaikan jumlah pengangguran di Palembang dari tahun 2005 sampai 2009, akan tetapi pada tahun 2010 tingkat pengangguran mulai menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,91 persen.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah

minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada kebutuhan fisik hidup layak berupa kebutuhan akan pangan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/199, upah minimum didefinisikan sebagai “Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap”³.

Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada wilayah tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi.

Perkembangan tingkat upah minimum di Kota Palembang pada Tabel 1.2 menunjukkan dari tahun 2004 sampai tahun 2014 upah minimum mengalami kenaikan yang terus menerus dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang besarnya mencapai 17,76 persen.

³. Gianie, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah Di Sektor Industri dan Perdagangan”, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm.3. diterbitkan

Tabel 1.2

Perkembangan Upah Minimum Kota di Palembang Tahun 2004 - 2014

Tahun	Upah Minimum Kota (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2004	460 000	3,98
2005	503 700	4,35
2006	604 000	5,22
2007	662 000	5,72
2008	743 000	6,43
2009	824 730	7,13
2010	952 897	8,24
2011	1 271 000	11,00
2012	1 630 000	14,10
2013	1 850 000	16,01
2014	2.053.000	17,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Tahun 2003-2015

Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa besaran upah yang ditetapkan pemerintah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini diikuti dengan peningkatan penduduk yang bekerja disertai dengan jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “ **Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Kota Palembang tahun 2004-2014**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap kesempatan kerja dan pengangguran di Kota Palembang pada tahun 2004 - 2014?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap pencari kerja dan penempatan kerja pada tahun 2004 - 2014?

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian yang terkait dengan Upah Minimum Kota (UMK) adalah kesempatan kerja, pengangguran, pencari kerja, penempatan kerja yang digunakan adalah data Kota Palembang dari tahun 2004 sampai tahun 2014.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk membuktikan pengaruh UMK terhadap kesempatan di Kota Palembang pada tahun 2004 - 2014.
2. Untuk membuktikan pengaruh UMK terhadap pengangguran di Kota Palembang pada tahun 2004 - 2014.
3. Untuk membuktikan pengaruh UMK terhadap pencari kerja di Kota Palembang pada tahun 2004 - 2014.

4. Untuk membuktikan pengaruh UMK terhadap penempatan kerja di Kota Palembang pada tahun 2004 - 2014.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan memperkaya kajian teoritik dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Penulis juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan standar upah minimum kota.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan penelitian yang akan ditulis, maka dilakukan pengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teoritik dan Pengembangan Hipotesis

Bagian ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis - hipotesis yang ada dapat dikembangkan.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel - variabel penelitian, instrumen penelitian (uji validitas dan reabilitas), dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

5. Bab V Kesimpulan

Bab ini terdiri dari penutup, berisi saran dan kesimpulan.

6. Daftar Pustaka

7. Lampiran-Lampiran